

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn)**

Anugrah Akbar Siregar¹, Ghina Salsabila Aven²

Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

INTISARI

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama dalam konteks penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur ketentuan pidana minimum terhadap pelanggaran tertentu, termasuk dalam Pasal 112 ayat (1) yang menetapkan pidana minimal 4 (empat) tahun penjara. Namun dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang menyimpangi ketentuan tersebut dengan alasan kemanusiaan dan pertimbangan individual terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pidana di bawah minimum khusus serta menelaah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Pertimbangan hakim mengacu pada fakta bahwa narkotika sintetis yang dimiliki terdakwa diperuntukkan untuk konsumsi pribadi, serta didukung oleh SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 1 Tahun 2017 yang membuka ruang diskresi untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum. Pertimbangan non-yuridis seperti usia muda terdakwa, sikap kooperatif, serta ketidakterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika juga menjadi dasar yang signifikan. Dengan demikian, hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana dan teori ratio decidendi yang menggabungkan aspek yuridis dan sosial demi tercapainya keadilan substantif. Putusan ini menjadi refleksi atas kebutuhan pembaruan hukum agar sistem pemidanaan lebih adaptif terhadap konteks dan kondisi pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Narkotika, Pidana Minimum Khusus, Pertimbangan Hakim.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

***A LEGAL REVIEW OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN
REDUCING SUB-MINIMUM SENTENCES SPECIFICALLY FOR DRUG
ABUSE***

(Case Study: Decision Number 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn)

Anugrah Akbar Siregar¹, Ghina Salsabila Aven²

Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

ABSTRACT

The imposition of sentences below the specific minimum limit in narcotics crime cases raises complex legal issues, especially in the context of applying the principles of legal certainty and justice. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics expressly regulates the provisions of minimum sentences for certain violations, including in Article 112 paragraph (1) which stipulates a minimum sentence of 4 (four) years in prison. However, in judicial practice, there are decisions that deviate from these provisions for humanitarian reasons and individual considerations of the defendant. This study aims to examine the application of sentences below the specific minimum and examine the basis for the judge's legal considerations in the Sleman District Court Decision Number 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The data used comes from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research show that the panel of judges sentenced the defendant to 1 (one) year in prison after being proven to have violated Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law. The judge's considerations refer to the fact that the synthetic narcotics owned by the defendant were intended for personal consumption, and are supported by SEMA No. 3 of 2015 and SEMA No. 1 of 2017 which open up room for discretion to impose a sentence below the minimum. Non legal considerations such as the defendant's young age, cooperative attitude, and non-involvement in drug trafficking networks also played a significant role. Thus, the judge applied the principle of individualization of punishment and the ratio decidendi theory, which combines legal and social aspects to achieve substantive justice. This decision reflects the need for legal reform to make the penal system more adaptive to the context and circumstances of drug offenders.

Keywords: *Special Minimum Sentence, Narcotics, Judge's Consideration, Substantive Justice.*

¹ Student of Law Study Program (S-1) General Achmad Yani University Yogyakarta

² Lecturer of the Law Study Program (S-1) General Achmad Yani University Yogyakarta